

## KLINIK BUMDES DI KECAMATAN MOJOAGUNG

Widy Taurus Sandy

Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi\*: [yunip.dewantara@gmail.com](mailto:yunip.dewantara@gmail.com)

### Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya manajemen operasional, administrasi yang belum terdigitalisasi, serta keterbatasan kemampuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes melalui program Klinik BUMDes di Kecamatan Mojoagung. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, pendampingan intensif, pelatihan pengelolaan administrasi digital, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan pengelolaan usaha desa. Program dilaksanakan pada tanggal 8–13 April 2024 dengan melibatkan 25 peserta pengelola BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait analisis kelayakan usaha, pengelolaan administrasi berbasis digital, serta kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban secara lebih sistematis. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan motivasi dan kesiapan dalam mengembangkan unit usaha desa secara lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, program Klinik BUMDes memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola BUMDes dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa.

**Kata kunci:** BUMDes, pemberdayaan desa, digitalisasi administrasi, manajemen usaha desa.

### Abstract

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in encouraging rural economic growth and improving community welfare. However, in practice, various obstacles are still encountered, including weak operational management, non-digitalized administration, and limited capability in preparing accountability reports. This community service activity aims to improve the capacity of BUMDes managers through the BUMDes Clinic program in Mojoagung District. The implementation method used a participatory approach through field observations, intensive mentoring, digital administration management training, and periodic evaluation of village business management development. The program was conducted on April 8–13, 2024 involving 25 BUMDes management participants. The results showed an increase in participants' understanding regarding business feasibility analysis, digital-based administrative management, and the ability to prepare accountability reports more systematically. In addition, participants demonstrated increased motivation and readiness to develop village business units more professionally and sustainably. Therefore, the BUMDes Clinic program contributes positively to strengthening BUMDes governance and improving the institutional capacity of village economies.*

**Keywords:** BUMDes, village empowerment, administrative digitalization, village business management.

## A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Kehadiran BUMDes menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis desa serta memperkuat kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal (Suharyanto & Sofianto, 2012). Selain sebagai lembaga usaha, BUMDes juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan desa, serta memperkuat ekonomi lokal.

Dalam perkembangannya, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek manajemen usaha, administrasi, dan tata kelola kelembagaan. Banyak BUMDes yang belum mampu menjalankan operasional usaha secara profesional akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem administrasi, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha (Prabowo, 2014). Selain itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan masih dilakukan secara sederhana sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan organisasi.

Kecamatan Mojoagung merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi desa melalui keberadaan BUMDes. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian pengelola BUMDes masih mengalami kendala dalam melakukan analisis kelayakan usaha, pengelolaan administrasi, dan digitalisasi data kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan dan pelatihan yang bersifat aplikatif agar pengelola BUMDes mampu menjalankan organisasi secara lebih profesional.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Klinik BUMDes dilaksanakan sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas pengelola usaha desa. Program ini difokuskan pada pendampingan intensif terkait manajemen operasional, digitalisasi administrasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban usaha.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes mengenai analisis kelayakan usaha desa.
2. Memberikan pendampingan dalam pengelolaan administrasi dan operasional BUMDes.
3. Meningkatkan kemampuan pengelola dalam memanfaatkan teknologi digital untuk administrasi kelembagaan.
4. Membantu pengelola dalam menyusun laporan pertanggungjawaban usaha secara sistematis dan akuntabel.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dibentuk sebagai sarana pengelolaan potensi ekonomi desa secara kolektif dan profesional. BUMDes memiliki fungsi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

BUMDes juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa melalui pengembangan usaha produktif. Menurut Prabowo (2014), keberhasilan pengelolaan BUMDes dipengaruhi oleh kemampuan manajemen organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha desa.

### **2. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam mengelola potensi yang

dimiliki secara mandiri. Menurut Ife dan Tesoriero (2016), pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas manajerial. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan pengelola dalam menjalankan organisasi serta memperkuat keberlanjutan usaha desa.

### 3. Digitalisasi Administrasi BUMDes

Transformasi digital menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan organisasi modern, termasuk dalam pengelolaan BUMDes. Digitalisasi administrasi dapat membantu pengelola dalam melakukan pencatatan data, pengarsipan dokumen, dan penyusunan laporan secara lebih efektif dan efisien (Nugroho, 2020). Penggunaan teknologi digital juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi desa.

Namun demikian, masih banyak pengelola BUMDes yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan dalam implementasi sistem administrasi modern di lingkungan desa (Rahayu & Day, 2017). Oleh sebab itu, diperlukan program pendampingan yang aplikatif dan mudah dipahami oleh pengelola BUMDes.

### 4. Manajemen Operasional BUMDes

Manajemen operasional merupakan proses pengelolaan kegiatan usaha agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan BUMDes, manajemen operasional meliputi perencanaan usaha, pengelolaan sumber daya, pengawasan kegiatan, dan evaluasi kinerja usaha. Menurut Hasibuan (2016), manajemen yang baik dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan memperkuat daya saing usaha.

Penerapan manajemen operasional yang tepat akan membantu BUMDes dalam mengembangkan unit usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelola BUMDes perlu memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi usaha secara sistematis.

## C. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Program Klinik BUMDes dilaksanakan pada tanggal 8–13 April 2024 di Kecamatan Mojoagung dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas pengelola dan pengurus BUMDes.

Metode pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu:

#### 1. Tahapan Awal

Tahap awal dilakukan melalui observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes. Kegiatan observasi dilakukan dengan wawancara langsung kepada peserta terkait kondisi usaha desa, sistem administrasi, serta kendala dalam pengelolaan operasional.

Selain itu, dilakukan pendataan mengenai bentuk usaha yang dijalankan BUMDes serta kesiapan pengelola dalam menerapkan sistem administrasi berbasis digital.

#### 2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian masyarakat yang meliputi:

- a. Pelatihan analisis kelayakan usaha BUMDes.

- b. Pendampingan pengelolaan manajemen operasional.
- c. Pelatihan digitalisasi administrasi dan pengarsipan data.
- d. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Kegiatan dilakukan secara langsung melalui metode ceramah, diskusi, simulasi, dan praktik pendampingan agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

### 3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam mengelola administrasi, menyusun laporan pertanggungjawaban, serta menerapkan sistem digital sederhana dalam operasional BUMDes.

Selain itu, dilakukan komunikasi lanjutan dengan peserta untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses implementasi hasil pelatihan.

## D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan program Klinik BUMDes di Kecamatan Mojoagung dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Program dimulai dengan kegiatan observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi pengelola BUMDes.

### 1. Tahap Observasi dan Identifikasi Masalah

Kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada peserta mengenai sistem pengelolaan usaha yang telah berjalan. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan utama, antara lain:

- a. Administrasi usaha masih dilakukan secara manual.
- b. Pengelola belum memahami penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sistematis.
- c. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan administrasi.
- d. Pengelola masih mengalami kesulitan dalam melakukan analisis usaha.

### 2. Tahap Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pelatihan dilakukan melalui seminar dan praktik langsung terkait pengelolaan BUMDes. Materi yang diberikan meliputi manajemen operasional, pengelolaan administrasi digital, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pada tahap ini, peserta diberikan pendampingan secara langsung dalam:

- a. Penyusunan format administrasi usaha.
- b. Penggunaan aplikasi sederhana untuk pencatatan data.
- c. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- d. Analisis potensi usaha desa.

Pendampingan dilakukan secara intensif agar peserta mampu memahami materi secara aplikatif dan dapat menerapkannya secara mandiri.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dalam pengelolaan administrasi dan operasional BUMDes.

Sebagian besar peserta mulai mampu melakukan pencatatan administrasi secara lebih terstruktur dan memahami pentingnya digitalisasi data kelembagaan. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban usaha secara sistematis.

Program Klinik BUMDes memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di Kecamatan Mojoagung. Meskipun implementasi digitalisasi administrasi masih memerlukan pendampingan lanjutan, program ini telah memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan usaha desa secara berkelanjutan.



## E. PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Klinik BUMDes di Kecamatan Mojoagung, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan intensif, peserta mampu memahami pengelolaan administrasi, analisis usaha, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara lebih sistematis.

Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya digitalisasi administrasi dalam mendukung efektivitas pengelolaan organisasi desa. Program Klinik BUMDes menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi desa secara profesional dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation (5th ed.). Pearson Education.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Kemendes.
- Nugroho, R. (2020). Transformasi digital dan tata kelola organisasi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 120–132.
- Prabowo, T. H. E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned enterprise) for sustainable poverty alleviation model village community study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal*, 30(2), 19–26.
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia. *Information Development*, 33(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/0266666915621107>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Suharyanto, A., & Sofianto, A. (2012). Model pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1), 1–12.